

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep sosial dan ekonomi harus diterapkan oleh penyedia layanan keuangan yang sempurna. Sementara prinsip ekonomi (efektif dan efisien) menjadi motor penggerak operasional lembaga, prinsip sosial ditunjukkan oleh kepedulian lembaga terhadap masyarakat di sekitarnya. Menurut (Ridwan & Saebani, 2013) masyarakat perlu memenuhi kebutuhan layanan keuangan untuk mendorong produktivitas bisnis.

Bagi kelompok ekonomi masyarakat yang menginginkan pendanaan untuk perluasan bisnis mereka, Baitul Maal wa Tamwil, atau BMT, menawarkan solusi. BMT adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas operasi bisnisnya berdasarkan prinsip operasional dan syariah dengan menciptakan usaha dan investasi yang menguntungkan. Berdasarkan namanya, Baitul Tamwil menunjukkan organisasi perusahaan, tetapi Baitul Maal menunjukkan organisasi sosial yang mirip dengan BAZIS (Badan Amil Zakat). Sebagai organisasi komersial, BMT sebagian besar berfokus pada sektor keuangan, khususnya pinjaman dan simpanan. Perusahaan ini beroperasi seperti bank, menghimpun dana dari nasabah, atau dalam konteks BMT, anggota dan calon anggota, dan menyalurkannya kepada ekonomi yang menguntungkan dan halal (Arumastuti, 2016).

BMT merupakan lembaga keuangan atau ekonomi Islam tidak resmi yang bukan merupakan bank. Berbeda dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan formal lainnya, lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat, oleh karena itu disebut lembaga informal. Dengan menciptakan usaha yang menguntungkan dan melakukan investasi untuk meningkatkan taraf kegiatan ekonomi pelaku usaha kecil lainnya, hal ini juga mendorong kegiatan menabung dan membantu mereka membiayai usaha mereka.

Dua tugas Baitul Tamwil atau rumah usaha dan Baitul Maal atau rumah dana digabung menjadi BMT. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Baitul Maal telah ada sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan (tasharuf) dana

sosial, termasuk zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Menurut (Yaqin, 2021) Baitul Tamwil merupakan lembaga usaha keuangan yang mengutamakan keuntungan.

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi yang menjalankan tugas sosial dan komersial secara bersamaan. Hal ini dikarenakan BMT mengandung dua istilah, salah satunya adalah Baitul Maal (Fungsi Sosial), yaitu lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana nirlaba, termasuk shadaqah, infaq, dan zakat. Penghapusan riba merupakan salah satu aspek tujuan sosial BMT yang harus difokuskan pada kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas. Lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana komersial, seperti tabungan, pinjaman, dan transaksi ekonomi yang menguntungkan, merupakan bagian dari sisi Baitul Tamwil (Fungsi Komersial). Dalam wadah BMT, kedua tugas ini membentuk suatu sistem yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Menurut (Alya, 2019) pengingkaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat fatal dan sangat merugikan reputasi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Jika salah satu atau kedua peran ini tidak dijalankan, maka tidak seorang pun berhak mengklaim lembaganya sebagai BMT.

Teka-teki yang dihadapi BMT adalah harus menjadi bank dan memperoleh status perseroan terbatas jika memperluas operasinya ke luar satu kabupaten atau kota. Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro saling tumpang tindih dalam persyaratannya, yang mempersulit transisi lembaga keuangan yang telah tumbuh di beberapa kabupaten atau kota. Menurut nota kesepahaman yang ditandatangani oleh tiga kementerian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga keuangan mikro.

Lebih jauh, status BMT sebagai lembaga keuangan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang menempatkannya di bawah yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penetapan status sebagai “lembaga keuangan” memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BMT. Sejak awal, visi dan misi organisasi mencakup tujuan bisnis dan fungsi sosial, seperti pengelolaan sedekah, zakat, dan infaq (Yaqin, 2021).

Dikutip dari www.knks.go.id dari jumlah penduduk yang kurang dari 265 juta jiwa, 40% tergolong kelas menengah dan 20% tergolong kelas bawah. Selain itu, sekitar 25,67 juta jiwa atau 9,66% dari jumlah penduduk tergolong miskin. Meski fakta di lapangan masih dipertanyakan, jumlah BMT saat ini tumbuh cukup pesat, yakni mencapai 4.500 unit. Meski jumlahnya sedikit, koperasi syariah di Indonesia tumbuh pesat dan cukup sukses (M. E. S. Indonesia, 2019). Koperasi simpan pinjam syariah (KSPPS) menyumbang 1,5% dari 150.223 unit usaha koperasi yang berdiri pada tahun 2021. Selain itu, terdapat 2.253 unit KSPPS dengan jumlah anggota 1,4 juta orang. Dengan volume usaha Rp 5,2 triliun, modal sendiri Rp 968 miliar dan modal eksternal Rp 3,9 triliun (M. E. S. Indonesia, 2019)

Berdasarkan www.retizen.go.id BMT di Indonesia telah berkembang menjadi sekitar 7.461 BMT yang beroperasi di tanah air hingga tahun 2020, dengan total aset sebesar Rp12,9 triliun. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6.997 BMT dengan total aset sebesar Rp11,6 triliun. Selain itu, BMT memiliki peran yang cukup besar bagi UMKM Indonesia. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BMT telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM di Indonesia sebesar lebih dari Rp11,6 triliun pada tahun 2020. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menyalurkan pembiayaan sebesar Rp9,9 triliun.

Meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan BMT kepada UMKM menunjukkan kontribusi yang cukup besar yang diberikan BMT bagi perkembangan dan kemajuan UMKM di Indonesia. Dengan memberikan pembiayaan yang mudah dan fleksibel, BMT dapat memfasilitasi perluasan akses permodalan bagi UMKM, sehingga dapat tumbuh dan semakin produktif. Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMKM), UMKM di tanah air tumbuh sangat pesat pada tahun 2022, yakni mencapai 8,71 juta unit. Dengan total 1,49 juta unit usaha, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak. Dengan jumlah keseluruhan 3,9 ribu unit, Papua menjadi daerah dengan jumlah UMKM paling sedikit. Oleh karena itu, diperlukan lembaga layanan keuangan mikro yang mampu menjangkau daerah-daerah usaha kecil yang belum terjangkau perbankan syariah (www.Retizen.go.id, 2023).

Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Aset LKMS



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Dari tabel terlampir terlihat bahwa BMT terus mengalami pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya, baik dari sisi total aset maupun dari sisi pendanaan lainnya. Terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan BMT di Indonesia sangat baik karena jika dilihat dari angka persentase (%) atau rasionya terus meningkat hingga mencapai Rp278,24 miliar pada tahun 2018. Aset LKMS meningkat sebesar Rp467,90 miliar pada tahun 2019, mencapai Rp499,70 miliar pada tahun 2020, dan mencapai pertumbuhan sebesar Rp567,20 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan aset LKMS selanjutnya mencapai Rp570,06 miliar pada tahun 2022.

Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Pembiayaan LKMS



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan pembiayaan LKMS sejak tahun 2018 hingga saat ini yang mencapai Rp112,83 miliar. Pembiayaan LKMS pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp169,03 miliar. Kemudian pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp192,77 miliar. Pada tahun 2021, pembiayaan LKMS mencapai Rp223,32 miliar. Kemudian pada tahun 2022, aset LKMS mencapai Rp246,58 miliar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BMT setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang pesat.

Gambar 1. 3 Grafik Perkembangan Simpanan LKMS



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Pada tahun 2018, pertumbuhan DPK LKMS mencapai 31,65% dari total industri LKM, dengan nilai pembiayaan dan aset LKMS masing-masing mencapai Rp112,83 miliar dan Rp278,24 miliar, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3 Grafik Perkembangan DPK LKMS. Pada tahun 2019, DPK LKMS mencapai 51,69% dari keseluruhan industri LKM, dengan nilai pembiayaan dan aset LKMS masing-masing sebesar Rp169,03 miliar dan Rp467,90 miliar. Pada tahun 2020, DPK LKMS mencapai 54,34% dari keseluruhan usaha LKM, dengan nilai pembiayaan dan aset LKMS masing-masing sebesar Rp192,77 miliar dan Rp499,70 miliar. Hingga tahun 2021, DPK LKMS tumbuh mencapai 66,23% dari total industri LKM dengan nilai pembiayaan dan aset LKMS masing-masing sebesar Rp223,32 miliar dan Rp567,20 miliar. Hingga Desember 2022, terdapat 81 lembaga LKMS atau 34% dari total industri LKM dengan nilai pendanaan dan aset LKMS masing-masing sebesar Rp248,58 miliar dan Rp570,06 miliar.

Sistem akuntansi yang baik sangat penting dalam pengelolaan aset lembaga keuangan syariah atau BMT. Untuk itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merilis PSAK No. 59, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur akuntansi perbankan syariah. Di dalamnya terdapat aturan transaksi berbasis imbalan serta pengakuan dan pengukuran masing-masing produk, meliputi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah, dan Qardhul Hasan.

Namun, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK No. 101) yang lebih tepat mengatur penyajian laporan keuangan syariah telah dirilis oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sesuai dengan perkembangan terkini. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan PSAK ini pada tanggal 27 Juni 2007 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Ketentuan PSAK Syariah No. 101 tentang penyajian laporan keuangan juga mengatur tentang penyajian laporan keuangan. PSAK Syariah ini akan memudahkan penyusunan laporan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai data dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. (MAYOLI, 2021)

Salah satu Koperasi yang berada di Indramayu yaitu BMT Haykal Zakri yang beralamat di Jl. Raya Pasar Sukra, No. 10, RT 03/RW 01, Karang Baru, Kec. Sukra, Kab. Indramayu. BMT Haykal Zakri berdiri dari tahun atau mulai beroperasinya pada tanggal 1 Juli 2000. Tujuan didirikannya adalah untuk peningkatan ekonomi umat khususnya pemberian bantuan dana untuk umum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam perkembangan sebuah BMT maka diperlukannya penyajian laporan keuangan, sehingga bisa melihat sehat atau tidaknya BMT, berkembang atau tidak BMT tersebut. Pentingnya laporan keuangan sebagai panduan untuk mengambil sebuah keputusan untuk periode selanjutnya. Adapun panduan laporan keuangan BMT berdasarkan teori itu harus sesuai dengan PSAK 101 paragraf 10 ada delapan komponen yaitu terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas Laporan Keuangan (D. S. A. Keuangan, 2014).

Keberadaan BMT yang awalnya menjadi suatu kekhawatiran bagi para anggota BMT terutama mereka yang sudah paham dengan aturan agama sehingga

melihat kondisi lingkungan terutama di wilayah Indramayu banyaknya keberadaan lembaga atau koperasi konvensional yaitu masih banyaknya masyarakat yang terlibat didalam transaksi Ribawi, kemudian anggota BMT Bergerak untuk menemukan cara supaya kemudian masyarakat muslim diwilayah Indramayu agar meminimalisir adanya transaksi Ribawi.

Berdasarkan data yang didapat dari BMT Haykal Zakri bahwa jumlah Laporan Posisi Keuangan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel data periode tahun 2021-2022 BMT Haykal Zakri Sukra

Tabel 1. 1
Laporan Posisi Keuangan Periode Tahun 2021-2022
BMT Haykal Zakri Sukra Indramayu

No	Tahun	Jumlah
1	2021	Rp. 3.689.603.890,70
2	2022	Rp. 4.044.471.468,44

Sumber : Data Laporan Keuangan di RAT BMT Haykal Zakri Sukra Indramayu

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah Laporan Posisi Keuangan akhir tahun di BMT Haykal Zakri Sukra Indramayu mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp. 3.689.603.890,70 dan tahun 2022 sebesar Rp. 4.044.471.468,44

Untuk menemukan sebuah fenomena dalam penelitian, maka peneliti membandingkan beberapa BMT dengan tujuan sebagai acuan perbandingan kasus dengan BMT Haykal Zakri Sukra. Berdasarkan hasil observasi pada BMT Amanah Belilas yang diteliti oleh (MAYOLI, 2021). Ditemukan beberapa permasalahan atau fenomena, yaitu pertama Laporan Keuangan yang disajikan BMT Amanah Belilas belum sesuai dengan format yang tersaji dalam PSAK No, 101 Tentang cara penyajian Laporan Keuangan entitas syariah. Kedua, berdasarkan penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga syariah harus membuat laporan Rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Sementara pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Amanah Belilas tidak dibuatkan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil. Ketiga, berdasarkan penerapan PSAK No.101 tertera bahwa dalam penyusunan laporan keuangan lembaga syariah komponen pertama Laporan Posisi Keuangan seharusnya menyajikan akun dana syirkah temporer, sedangkan pada laporan keuangan didalam RAT BMT Amanah

Belilas tahun 2019 tidak menyajikan akun dana syirkah temporer. Keempat, Berdasarkan penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan lembaga syariah, harus menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Sedangkan pada laporan keuangan didalam RAT BMT Amanah Belilas tahun 2019 tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, sedangkan mereka melakukan pencatatan dana zakat atau dibukukan pada rekening koran tabungan, di rekening ini tertera saldo yang disetorkan dan penarikan saja. Kelima, Berdasarkan penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan lembaga syariah, harus menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sedangkan pada laporan keuangan didalam RAT BMT Amanah Belilas tahun 2019 atau didalam laporan keuangan tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sedangkan mereka melakukan pencatatan dana infak atau dibukukan pada rekening koran tabungan, di rekening ini tertera saldo yang disetorkan dan penarikan saja.

Dari beberapa fenomena diatas bahwa BMT Amanah Belilas dalam menyajikan Laporan Keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.101. Sedangkan BMT merupakan lembaga berlabel syariah.

Pada pernyataan diatas, maka peneliti akan menjadikan BMT Amanah Belilas sebagai acuan perbandingan, untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan BMT Haykal Zakri Sukra dengan PSAK 101 dalam rentang waktu terhitung dari 2020 sampai 2023 dan beberapa laporan dihitung sejak 2017-2020 seperti laporan sumber dan pendayagunaan dana zakat.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 10 disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari delapan komponen. Komponen tersebut yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan Rekonsiliasi pendapatan dan Bagi hasil, dan catatan atas laporan keuangan (D. S. A. Keuangan, 2014)

BMT Haykal Zakri Indramayu menyajikan laporan keuangan yang dihasilkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Adapun laporan yang disajikan antara lain Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan arus kas serta laporan sumber dan pendayagunaan dana zakat. Sedangkan laporan

perubahan ekuitas dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak disajikan secara terpisah, masih tercantum dalam laporan posisi keuangan, serta catatan atas laporan keuangan tidak disajikan secara rinci.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup terbatas dalam pembahasan skripsi dengan judul “PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT PSAK 101 DI *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) HAYKAL ZAKRI INDRAMAYU”.



B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian hanya terfokus pada permasalahan atau fenomena yang ada pada perusahaan, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada :

1. Penelitian ini hanya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada BMT Haykal Zakri Indramayu.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada laporan keuangan didalam RAT BMT Haykal Zakri periode 2020-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses penyajian Laporan Keuangan pada BMT Haykal Zakri Sukra Indramayu ?
2. Apakah penyajian Laporan Keuangan di BMT Haykal Zakri sudah sesuai dengan PSAK No. 101?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menganalisis penerapan penyajian dan pengukuran Laporan Keuangan pada BMT Haykal Zakri Sukra Indramayu menurut PSAK No. 101
2. Menganalisis keseuaian penyajian Laporan Keuangan di BMT Haykal Zakri Sukra Indramayu dengan PSAK No.101

E. Manfaat Penelitian

Di harapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No.101
2. Sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penulisan topik yang sama dimasa yang akan datang.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

F. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ananda, 2020) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Islam Abdurrah Pekanbaru” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BMTIA Pekanbaru telah melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan penyusunan laporan posisi keuangannya telah sesuai dengan PSAK 101, apa saja tantangan dalam penyusunan laporan posisi keuangan, dan bagaimana penyajian laporan keuangan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan PSAK 101. Untuk menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan yang memadai dan tanpa bertujuan untuk menarik generalisasi atau simpulan yang berlaku secara umum, maka digunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, BMTIA Pekanbaru telah memasukkan PSAK 101 ke dalam penyajian laporan keuangan syariahnya, namun hal tersebut belum optimal karena BMTIA hanya menggunakan laporan keuangan saja, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sehingga belum sesuai dengan PSAK 101. mengabaikan kewajiban dengan dana syirkah temporer; memasukkan dana zakat dalam laporan neraca; tidak memasukkan laporan tentang sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi memasukkan laporan tentang sumber dan penggunaan dana zakat (infak dan sodakoh) dalam laporan neraca; selain itu, BMTIA memasukkan dana wakaf dalam neraca dengan rekening tabungan pokok khusus. BMTIA tidak mengalami kendala atau batasan dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Dengan menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang laporan keuangan syariah, BMTIA Pekanbaru berupaya menelaraskan laporan posisi keuangan dengan PSAK

101 dalam penyusunan laporan keuangan bagian keuangan. Kata kunci: Laporan Keuangan, PSAK 101.

Berbeda dengan penelitian ini yang hanya mengkaji pencatatan dan penyajian laporan keuangan BMT Haykal Zakri, penelitian sebelumnya mengkaji tantangan penyusunan laporan keuangan dan upaya perusahaan dalam mematuhi PSAK 101.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (MAYOLI, 2021) yang berjudul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Kasus Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Amanah Belilas Indragiri Hulu Periode 2019)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian penyusunan laporan keuangan BMT Amanah Belilas dengan menggunakan PSAK No. 101. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BMT Amanah Belilas telah melaksanakan sebagian laporan keuangannya, namun sebagian laporan keuangan tersebut belum sesuai dengan PSAK No. 101. Hal tersebut antara lain: BMT Amanah Belilas belum membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, maupun rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang ditampilkan hanya laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Dana syirkah temporer tidak tercantum dalam laporan Posisi Keuangan BMT Amanah Belilas. Masih terdapat beberapa dari delapan komponen penyajian laporan keuangan yang namanya tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam PSAK 101.

Salah satu cara untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya melihat bagaimana laporan keuangan di BMT Amanah Belilas disajikan dengan menggunakan PSAK 101. Penelitian ini mengkaji bagaimana laporan keuangan dicatat, dilaporkan, dan disajikan dengan menggunakan PSAK 101.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yurian, 2020) dengan Judul “Analisis Penerapan PSAK 101 (Studi Pada *Baitul Maal wat Tamwil* Masyarakat Madani, Sumatera Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani menurut PSAK 101. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan di BMT Masyarakat Madani. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada BMT Masyarakat Madani. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani. Penelitian ini diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal sistematika penyajian laporan keuangan. Selanjutnya dilakukan penyesuaian dan pembandingan dua unsur, yakni Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani 2019, dan PSAK 101 tentang standar penyajian laporan keuangan. Namun, faktanya dalam penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan, laporan sumber dan penyaluran dana zakat juga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang semestinya kedua laporan tersebutlah yang menjadi titik perbedaan antara laporan keuangan entitas syariah dan laporan keuangan konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus terkait standar dan laporan keuangan, terbatasnya SDM dan belum dilaksanakannya SOP secara 100%. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan, terbatasnya SDM Dinas Koperasi, dan belum tersedianya wadah jika terdapat pertanyaan terkait PSAK. Dengan penelitian ini diharapkan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani melengkapi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

penyajian laporan keuangan di BMT Masyarakat Madani. Sementara pada penelitian saat ini hanya terfokus dalam penyajian laporan keuangan di BMT Haykal Zakri berdasarkan PSAK 101.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmatunnisa, 2022) yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 101) Pada Laporan Keuangan KSP BMT Surya Abadi Jenangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada laporan keuangan di KSP BMT Surya Abadi jenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang dibuat oleh *Baitul Maal Wa Tamwil*. Hasil penelitian ini BMT Surya Abadi jenangan dalam mempertanggungjawabkan keuangannya hanya menyajikan laporan Neraca dan Laba/ Rugi. KSP BMT Surya Abadi Belum menerapkan PSAK No. 101, karena berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Dana Kebajikan, dan catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Surya Abadi jenangan hanya menyusun laporan neraca dan Laporan Laba Rugi.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti sebelumnya hanya menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan pada BMT Surya Abadi Jenangan berdasarkan PSAK No.101. Sementara pada peneliti saat ini menganalisis kesesuaian pencatatan, pelaporan dan penyajian laporan keuangan pada BMT Haykal Zakri berdasarkan PSAK No.101.

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Novita, 2022) yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan Di BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dari segi sumber dananya, prosedur penyaluran pembiayaannya, dan pemanfaatan dananya yang diterapkan di BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Islam Abdurrab Pekanbaru sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Mulai tersalurkannya dana pembiayaan *qardhul hasan* ini pada tahun 2018. Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Sementara itu untuk prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada dasarnya sama dengan prosedur pembiayaan lainnya. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian. Pihak BMT Islam Abdurrab melakukan penilaian terhadap anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan menggunakan prinsip analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dapat membantu anggota yang sedang kesulitan dengan memberikan dana talang jangka pendek dan tidak mempersulit anggota dalam pengajuan pembiayaan.

Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya menguji kesesuaian penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2001. Pada BMT Islam Abdurrab Pekanbaru. Sementara pada penelitian saat ini membahas penyajian keseluruhan laporan keuangan pada BMT Haykal Zakri Indramayu berdasarkan PSAK 101.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Maysandra, 2022) yang berjudul “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Kampar”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 tentang penyajian laporan keuangan pada BMT UGT Nusantara Cabang Kampar. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan yang didapat dari BMT

UGT Nusantara Cabang Kampar. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar belum sesuai dengan PSAK NO. 101. BMT UGT Nusantara Cabang Kampar hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi saja. Hasil penelitian juga menemukan pada laporan neraca kewajiban dan ekuitas pihak BMT UGT Nusantara Cabang Kampar membuat laporan dana syirkah digabung dengan laporan kewajiban, dimana seharusnya dana syirkah harus dibuat secara terpisah berdasarkan PSAK 101. Pihak BMT UGT Nusantara Cabang Kampar juga tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu meneliti pengimplementasian PSAK 101 pada BMT UGT Nusantara. Sementara pada peneliti saat ini menganalisis kesesuaian laporan penyajian keuangan BMT Haykal Zakri dengan PSAK No 101.

7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Solekha et al., 2021) yang berjudul "*Baitul Maal wa Tamwil* sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)". Penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait konsep dan teori dari *Baitul Maal Wa Tamwil*, sebab didasarkan atas kenyataan yang terjadi dilingkungan bahwa BMT menunjukkan keberhasilannya yang telah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia, terbukti pada tahun 2016 mencapai 6000 unit BMT dan mendapati prospek yang baik. Jenis penelitian kualitatif, didukung oleh data yang diambil secara sekunder menggunakan studi pustaka. Untuk mendukung penelitian, penulis mengolah data menggunakan Ms. Excel. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah sebagai swadaya masyarakat yang menghimpun dan mengelola dana sesuai prinsip syariah demi tercapainya tujuan ekonomi keuangan serta kemanusiaan atau mencapai kemashlahatan. BMT tidak hanya berfokus pada aktivitas keuangan saja melainkan juga aktivitas kebajikan sosial. BMT mengacu pada sumber otoritatif Islam, UU No. 25

1992 tentang koperasi dan fatwa DSN-MUI. Sumber keuangan berasal dari nasabah dan hasil pendapatan operasional. Dana nasabah kemudian dikelola menggunakan pembiayaan dan akad syariah, keuntungan dinamakan sebagai bagi hasil. BMT harus selalu melakukan evaluasi supaya sistem operasional dan sumber dayanya lebih baik serta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu meneliti Teori dan Konsep Lembaga BMT yang dianggap telah sukses menunjukkan keberhasilannya yang telah tersebar luas hampir di seluruh wilayah Indonesia, terbukti di Tahun 2016 mencapai 6000 unit BMT dan menemukan prospek yang baik. Sedangkan pada peneliti saat ini hanya menganalisis BMT Haykal Zakri.

8. Berdasarkan penelitian (Noorsyah, 2023) yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Tentang Laporan Keuangan Syariah Pada KSPPS BMT ItQan Bandung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah di KSPPS BMT ItQan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Kemudian jenis data yang digunakan ialah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KSPPS BMT ItQan Bandung dalam penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 101 belum sepenuhnya menerapkan, dikarenakan mengacu pada kementerian koperasi yang mana menetapkan standar akuntansi keuangan untuk koperasi syariah ialah SAK ETAP adapun penerapan PSAK 101 nya hanya pada transaksi-transaksi syariahnya saja seperti Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu hanya mengkaji pelaporan keuangan pada KSPPS BMT ItQan berdasarkan PSAK 101. Sementara pada peneliti saat ini mengkaji pencatatan, pelaporan, serta penyajian laporan keuangan BMT Haykal Zakri berdasarkan PSAK 101.

9. Berdasarkan penelitian (Dewi, 2021) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi”. Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan yang disusun oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi menurut PSAK No. 101. Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Dari analisa yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan antara lain: analisa terhadap laporan posisi keuangan, analisa terhadap laporan laba rugi dan komprehensif lain, pelaporan sumber dan penyaluran dana zakat, pelaporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi belum lengkap dan rinci, sehingga belum sesuai dengan PSAK No. 101 yang berlaku saat ini. Dengan penelitian ini, diharapkan BMT Al-Hijrah Bukittinggi dapat menyusun laporan keuangan dengan lengkap sesuai Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu hanya menyesuaikan penyajian laporan keuangan BMT Al-Hijrah Bukittinggi berdasarkan PSAK 101. Sementara peneliti saat ini menyesuaikan pencatatan, pelaporan, serta penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 pada BMT Haykal Zakri.

10. Berdasarkan penelitian (Adnan & Furywardhana, 2006) yang berjudul “Analisis Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 101 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Al Ittihad Rumbai Tahun 2020)”. Standar Akuntansi adalah pedoman penyusunan pokok pada penyajian laporan keuangan yang menjadi acuan dari setiap perusahaan.

Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Ittihad. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian penyusunan laporan keuangan BMT Al-Ittihad dengan PSAK NO. 101. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif dan wawancara langsung dengan manager BMT Al Ittihad Rumbai yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Sedangkan sumber data berasal dari peraturan yang berlaku, media, dan data yang sudah diolah dan disajikan oleh BMT Al Ittihad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Ittihad sudah menerapkan PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah namun belum maksimal karena BMT Al-Ittihad dalam penyajian laporan keuangan belum lengkap, BMT Al-Ittihad hanya menerapkan laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi/SHU, laporan perubahan modal/ekuitas dan laporan arus kas, BMT Al-Ittihad mengabungkan kewajiban dengan dana syirkah temporer, tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan melainkan memasukkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan laba rugi bagian akun biaya operasional lainnya. Dengan penelitian ini diharapkan BMT Al-Ittihad menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.101.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti sebelumnya hanya menganalisis penyusunan laporan keuangan di BMT Al-Ittihad berdasarkan PSAK 101. Sementara pada penelitian saat ini menganalisis pencatatan serta pelaporan dan penyajian laporan keuangan di BMT Haykal Zakri berdasarkan PSAK No.101.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Sugiyono menuturkan bahwa kerangka berfikir adalah sebuah model konseptual mengenai hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai suatu masalah (Sugiyono, 2018)

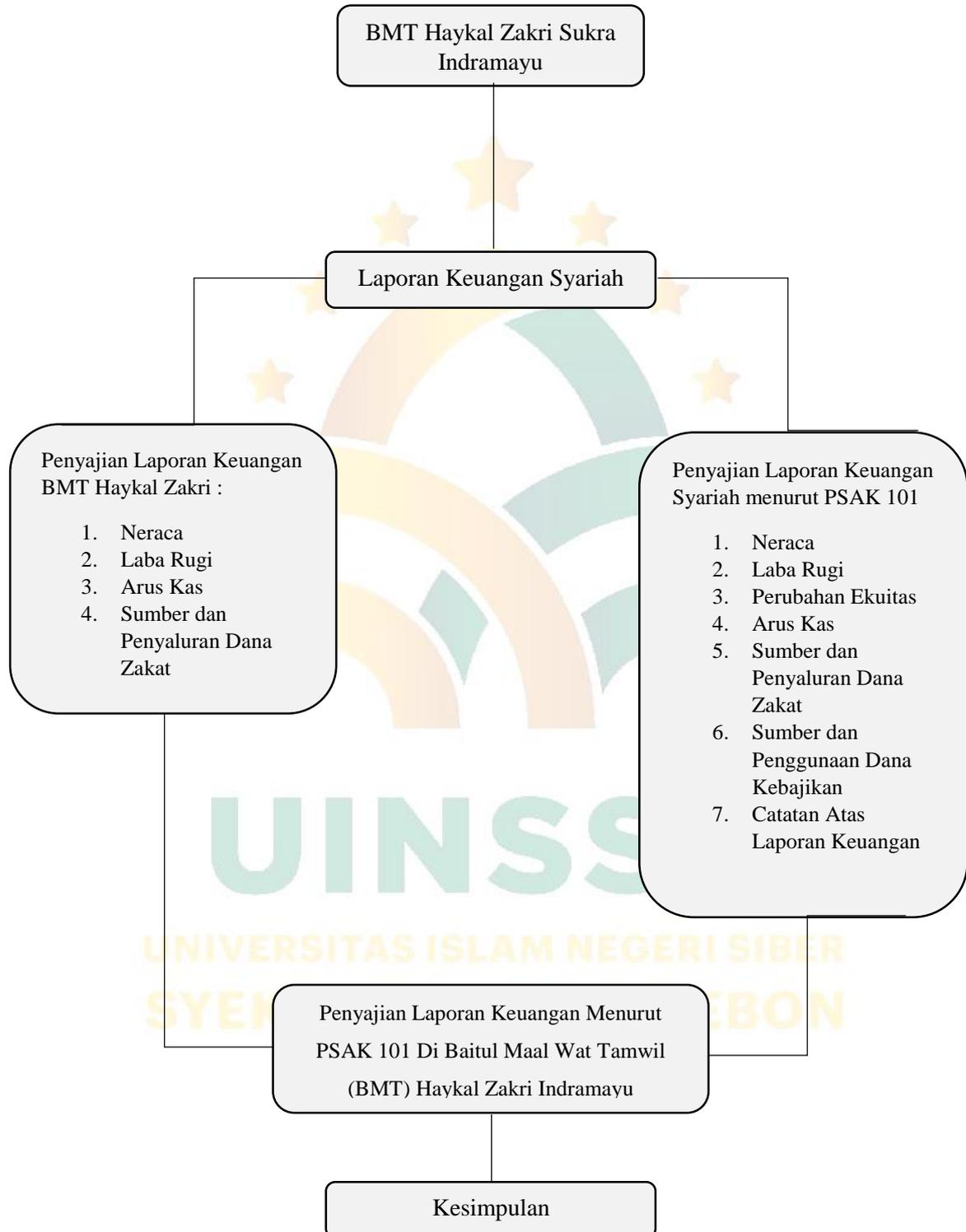
Penyajian laporan keuangan secara wajar yang berarti bahwa laporan keuangan menyajikan secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria dan definisi pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (D. S. A. Keuangan, 2014)

Kepatuhan penyajian laporan keuangan dengan SAK harus disajikan secara eksplisit dan tanpa terkecuali dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah dianggap patuh dengan SAK apabila entitas syariah telah patuh terhadap seluruh persyaratan SAK (D. S. A. Keuangan, 2014)

Eksistensi industri keuangan syariah semakin berkembang, tidak hanya perbankan syariah, melainkan juga lembaga keuangan syariah lainnya sehingga perlu dilakukan pembaruan standar terkait akuntansi syariah mengingat dalam PSAK 59 hanya mengatur tentang akuntansi bank syariah.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada 27 Juni 2007 menggantikan PSAK 59. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah (www.iaiglobal.com)

Tabel 1. 2
Kerangka Pemikiran



H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini juga disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya pada kondisi alamiah. Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Instrument dalam penelitian kualitatif adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2018).

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan menurut PSAK No.101 di BMT Haykal Zakri Indramayu. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian studi kasus, karena penelitian ini hanya berfokus pada penyajian laporan keuangan di BMT Haykal Zakri Indramayu.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan November 2023. Penelitian ini dilakukan di BMT Haykal Zakri Indramayu yang beralamatkan di Jl.Raya Sumuradem Sukra , RT.001 / RW 07, Karang Layung, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat

4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BMT Haykal Zakri Indramayu periode 2021.

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data (Arikunto, 2007). Subjek penelitian ini yaitu bagaimana analisis laporan keuangan BMT Haykal Zakri Indramayu periode 2021 dan hasil wawancara pada pihak BMT Haykal Zakri Indramayu.

5. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti (Nanang, 2015). Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait di *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Haykal Zakri yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti Pengurus (Ketua), Badan Pengawas (Ketua), merangkap juga sebagai penyusun laporan keuangan 2021, pengelola (Manager).

b. Data Sekunder

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Maksudnya memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain (Nanang, 2015). Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari laporan yang di buat oleh suatu institusi baik berupa laporan-laporan kantor, seperti laporan keuangan, buku, jurnal, deskripsi umum tentang ruang lingkup dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang di perlukan penelitian ini diantaranya seperti laporan tahunan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Haykal Zakri, sumber pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang strategis dalam melakukan penelitian karena pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengurus (Ketua), Badan Pengawas (Ketua) merangkap juga sebagai Penyusun Laporan Keuangan 2021, Pengelola (Manager).

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2014). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan implementasi akuntansi syariah di BMT Haykal Zakri Indramayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui foto, peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pelaksanaannya, peneliti akan menggunakan data laporan keuangan BMT Haykal Zakri beserta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif menurut (Sujarweni, 2014) sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

U Merupakan proses mengumpulkan data yang di peroleh dari S pengamatan langsung di lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada objek penelitian (Sugiyono, 2018)

b. Reduksi data

Data yang di peroleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang di peroleh di reduksi, dirangkum, di pilih hal-hal yang pokok, dan di fokuskan pada hal-hal yang penting.

Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang di peroleh jika di perlukan (Sugiyono, 2018).

Reduksi data dalam penelitian ini diawali dengan riset data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian reduksi data berdasarkan pada batasan masalah.

c. Penyajian Data

Data yang di peroleh di kategorikan menurut pokok permasalahan dan di buat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat polapola hubungan satu data dengan data lainnya. Pada langkah ini peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan.

d. Kesimpulan dan verivikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah di reduksi dan di sajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverivikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverivikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota (Sugiyono, 2018). Proses penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 di BMT Haykal

U Zakri Indramayu.

8. Uji Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah perlu adanya pengujian keabsahan data (Sugiyono, 2018). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Suatu data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara yang dilaporkan peneliti dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi

pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2018). Uji kredibilitas memiliki beberapa cara, penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

1) Triangulasi

Triangulasi bertujuan untuk menguatkan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu (Sugiyono, 2018). Triangulasi pada penelitian ini yang meliputi:

a) Triangulasi Sumber

Pengujian menggunakan triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sumber yang diambil yaitu dari consumer analysis dan accounting system.

b) Triangulasi Metode

Pengujian triangulasi Metode yaitu pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

c) Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*Participant Observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

2) Menggunakan Bahan Referensi

Referensi yang dimaksud yaitu suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Pendukung dalam penelitian ini seperti rekaman wawancara, foto-foto dan lainnya (Sugiyono, 2018).

b. Uji Transferability

Nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain (Sugiyono, 2018). Supaya dapat dipahami hasil dari penelitian kualitatif tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya disertai dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dipercaya (Sugiyono, 2018).

c. Uji Dependability

Uji dependability dilakukan dengan pengecekan terhadap keseluruhan proses dalam penelitian. Apabila dalam penelitian terdapat suatu proses yang tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Pengecekan keseluruhan proses ini dilakukan oleh pembimbing penelitian (Sugiyono, 2018).

d. Uji Konfirmability

Konfirmabilitas merupakan proses dari kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai konsep transparansi, sebagai bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan mengenai proses-proses dan elemen-elemen penelitian selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian dari hasil temuan sekaligus meminta persetujuan dari pihak terkait (Sugiyono, 2018).

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan yang lebih rinci dan sistematis, maka pembahasan dapat dibagi atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori tentang tema secara umum dan teori tentang variabel secara umum.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini digambarkan mengenai gambaran umum *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Haykal Zakri dan data-data deskriptif. Gambaran umum ini menjelaskan tentang sejarah berdiri, visi misi, dan struktur organisasi BMT Haykal Zakri Indramayu.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (Bmt) Haykal Zakri Indramayu.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi, yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.